

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**



**BADAN PENDAPATAN  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa berkat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 dapat disajikan lewat laporan ini. Persiapan untuk melakukan reformasi disegala bidang telah menghasilkan dasar-dasar perubahan dibidang Manajemen Pemerintahan antara lain diwujudkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Untuk itu sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut diatas mampu menerapkan teknik dan ketentuan-ketentuan dalam mengimplementasikan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dengan demikian maka Laporan Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao ini dapat dibuat.

Sangat disadari bahwa masih banyak program yang belum dapat diukur manfaat dalam jangka panjang. Namun apapun yang terjadi kami akan terus berupaya memberikan perbaikan-perbaikan terhadap pengelolaan program yang lebih berkualitas, transparan dan partisipatif. Dengan demikian dapat diukur tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

Laporan ini disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak akan menjadi bahan penyempurnaannya.

Baa, 20 Januari 2020

Kepala Badan Pendapatan

Kabupaten Rote Ndao

**Melkianus Ndun, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630327 198503 1 014

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Bahwa terwujudnya pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga keseimbangan interaktif yang konstruktif diantara domain negara merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada jajaran aparatur negara. Visi Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berkualitas, Transparan, Partisipatif dan Akuntabel Yang Didukung Oleh Aparat Pengelola Pendapatan Yang Profesional”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan sejumlah misi untuk mendukung yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme SDM Aparat dan Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Misi tersebut diatas, maka dilakukan berbagai kegiatan seperti terlampir, yang evaluasi kinerjanya telah dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan, berhasil atau tidak.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok atau penunjang tersebut dana Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao TA. 2019 sebesar Rp.2.987.339.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.917.419.327,- atau sebesar 97,66%.

Pencapaian kinerja sasaran Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	RATA-RATACAPAIAN KINERJA(%)	SKALA ORDINAL
1.	Peningkatan kualitas penerimaan daerah	181,94	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan fungsi-fungsi organisasi yang dapat meningkatkan mutu pelayanan	100	Sangat Berhasil

Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tercapai dan berhasil namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti :

1. Kurangnya Kualitas dan kapasitas SDM Badan Pendapatan;
2. Belum dilaksanakan sepenuhnya prosedur standar operasional untuk melaksanakan kegiatan terutama pada pengelolaan pendapatan;
3. Tuntutan target penerimaan pendapatan asli daerah yang selalu meningkat;
4. Potensi PAD belum dikelola secara maksimal;
6. Nilai objek pajak PBB yang belum sesuai dilapangan;
7. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
8. Instansi pengelola income selain Badan Pendapatan masih ada yang belum mencapai target penerimaan pendapatannya yang mempengaruhi capaian penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan;
9. Lebar nya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Baa, 20 Januari 2020  
Kepala Badan Pendapatan  
Kabupaten Rote Ndao

**Melkianus Ndun, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630327 198503 1 014

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Gambaran Umum .... ..	2
D. Dasar Hukum.....	5
E. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
A. Rencana Strategis .....	7
1. Visi.....	8
2. Misi .....	9
3. Tujuan dan Sasaran .....	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	11
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A. Analisis Capaian Kinerja.....	12
1. Akuntabilitas Kinerja .....	12
2. Pengukuran Kinerja.....	13
B. Realisasi Anggaran.....	17
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>19</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita daerah. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao sebagai unsur penyelenggara negara di daerah wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Sebagai instrumen pertanggungjawaban dan pelaporan Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao;
2. Sebagai entry point yang menjadi point model acuan pembelajaran Rencana Kinerja Badan Pendapatan selanjutnya.

Sedang tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Untuk melihat tingkat progresivitas dan kegagalan Kinerja Badan;
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan krusial yang resistant.
3. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian sehingga terwujud Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, berdaya guna / berhasil guna, berdaya saing dan berkelanjutan.

## C. Gambaran Umum

Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur staf perangkat dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, maka Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

### 1. Bagan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu 4 Bidang dan Sekretariat yakni :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  - ❖ Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - ❖ Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Pajak Daerah terdiri dari :
  - ❖ Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
  - ❖ Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah;
  - ❖ Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
3. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lain-Lain, terdiri dari :
  - ❖ Sub Bidang Pendataan Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-Lain;
  - ❖ Sub Bidang Penerimaan Retribusi;
  - ❖ Sub Bidang Penerimaan Pendapatan Daerah Lain-Lain.
4. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :
  - ❖ Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - ❖ Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan;
  - ❖ Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan.

5. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Penyuluhan, terdiri dari :

- ❖ Sub Bidang Pembukuan;
- ❖ Sub Bidang Pelaporan;
- ❖ Sub Bidang Penyuluhan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

## 2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao berjumlah 47 orang PNS dan 16 orang Tenaga Kontrak Daerah. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, perumusan kebijakan, dalam pelaksana pengendalian pembangunan. Pada Tahun 2019 jumlah pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao berjumlah 47 orang, terdiri dari 23 orang Pejabat Struktural dan 24 Pelaksana. Rincian Pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

### **Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Jenis Kelamin Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019**

Gol	Pangkat	Jenis kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
I/a	Juru Muda	0	0	0
I/b	Juru Muda Tk. I	0	0	0
I/c	Juru	1	0	1
I/d	Juru Tk. I	0	0	0
<b>Jumlah Golongan I</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



II/a	Pengatur Muda	0	0	0
II/b	Pengatur Muda Tk. I	5	2	7
II/c	Pengatur	3	0	3
II/d	Pengatur Tk. I	7	1	8
<b>Jumlah Golongan II</b>		<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
III/a	Penata Muda	1	2	3
III/b	Penata Muda Tk. I	2	0	2
III/c	Penata	5	0	5
III/d	Penata Tk. I	13	1	14
<b>Jumlah Golongan III</b>		<b>21</b>	<b>3</b>	<b>24</b>
IV/a	Pembina	2	1	3
IV/b	Pembina Tk. I	0	0	2
IV/c	Pembina Utama Muda	1	0	0
IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0
<b>Jumlah Golongan IV</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>7</b>	<b>47</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 47 orang yang bekerja pada Badan Pendapatan Kab.Rote Ndao, 40 orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang perempuan.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin  
Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SD	-	-	-
2	SMP	1	-	1
3	SLTA	17	3	20
4	D-1	-	-	-
5	D-2	-	-	-
6	D-3	-	2	2
7	S-1	19	2	21
8	S-2	3	-	3
9	S-3	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>7</b>	<b>47</b>

Dari jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 3 orang, S1 berjumlah 21 orang, D3 berjumlah 2 orang, SMA berjumlah 20 orang dan SMP berjumlah 1 orang

### **3. Sumber Pembiayaan**

Sumber pembiayaan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

### **4. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, maka Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**Tugas Pokok :**

Badan Pendapatan mempunyai tugas pokok : **“Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah”**.

**Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas Badan Pendapatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**D. DASAR HUKUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

LKIP Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. RENCANA STRATEGIS
  - a. Visi
  - b. Misi
  - c. Penetapan Tujuan dan Sasaran
    - 1. Tujuan
    - 2. Sasaran
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Analisis Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Substansi Perencanaan strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan suatu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya untuk diimplementasikan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Renstra sangat bermanfaat dan diperlukan untuk :

1. Merencanakan aktifitas perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era reformasi mengakibatkan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin prima, semakin terbatasnya sumber daya serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal ini yang mendorong Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan perubahan mendasar, untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan.

Perencanaan Strategis akan menuntun diagnosa Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan Perencanaan Strategis ini diharapkan menjadi bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapasitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Menentukan orientasi masa depan.

Perencanaan Strategis memungkinkan Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Perencanaan Strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif guna implementasi dan implikasi yang terjadi dan dapat diarahkan untuk merencanakan strategi organisasi pada masa mendatang.

4. Adaptif.

Fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam Perencanaan Strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam Perencanaan Strategik.

5. Pelayanan Prima.

Pelayanan kepada masyarakat dalam era globalisasi merupakan hal yang utama untuk diperhatikan Pemerintah. Disamping itu dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu pemahaman terhadap siapa pelanggan, kebutuhannya serta solusi pemenuhannya sangat diperlukan. Pola pelayanan yang perlu diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau masyarakat sebagai penerima jasa layanan pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk dapat tetap diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu pemahaman terhadap siapa pelanggan, kebutuhannya serta solusi pemenuhannya sangat diperlukan. Pola pelayanan yang perlu diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau masyarakat sebagai penerima jasa layanan.

6. Meningkatkan komunikasi.

Implementasi Perencanaan Strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi. Mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai dan mendorong pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan. Implementasi Perencanaan Strategis oleh Pemerintah dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horisontal organisasi.

## **Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao.**

### **RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN TAHUN 2019-2024**

#### **a. Visi :**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat 3 (tiga) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang pengesahannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM

Nasional. Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yakni :***“Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT dan Berkelanjutan yang bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”***. Berdasarkan rumusan di atas maka visi Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah :

***“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berkualitas, Transparan, Partisipatif dan Akuntabel Yang Didukung Oleh Aparat Pengelola Pendapatan Yang Profesional”***.

#### **b. Misi :**

Berdasarkan visi Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka misi Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme SDM Aparat dan Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

#### **c. Tujuan dan Sasaran**

##### **1. Tujuan Pelayanan SKPD**

Tujuan Organisasi adalah untuk memperjelas fokus pelaksanaan misi kemudian menetapkan kerangka prioritas untuk memberikan arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao sebagai unit teknis memfokuskan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yakni:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Aparat Badan Pendapatan;

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Aparat Badan Pendapatan;
3. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan bidang Pendapatan Daerah;
4. Meningkatkan fungsi dan peran di bidang Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
6. Ketepatan, kecepatan, kemudahan, keadilan dan tuntas dalam pemungutan Pendapatan Daerah

## **2. Sasaran**

Sasaran merupakan gambaran dari tujuan yang akan dicapai oleh suatu lembaga dengan sasaran prioritas, tindakan SDA, SDM dan Dana dalam kegiatan operasional.

Sasaran Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Adanya kebijakan dan peraturan-peraturan yang mendukung kegiatan bidang Pendapatan Daerah;
2. Tersedianya juklak dan juknis yang menjadi pedoman pemungutan Pendapatan Daerah;
3. Terlaksananya sosialisasi tentang jenis-jenis pendapatan serta tata cara Pemungutan;
4. Terciptanya serta tersedianya informasi Pendapatan Daerah yang akurat;
5. Tersedianya sumberdaya manusia (aparatus) yang berkualitas dan profesional;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan;
7. Meningkatnya fasilitas pendukung data Pendapatan Daerah.

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tersebut di atas, maka Badan Pendapatan merumuskan program dan kegiatan strategis sebagai berikut :

### **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
2. Kegiatan Peningkatan dan Identifikasi Obyek Pajak PBB P2, NJOP, NOP dan ZNT
3. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PAD
4. Kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan PAD
5. Kegiatan Penetapan Zona Nilai Tanah dan Analisis Nilai Perolehan Bangunan
6. Kegiatan Pembentukan Basis Data PBB
7. Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan PAD
8. Kegiatan Pelaksanaan Aplikasi Pendapatan Daerah
9. Kegiatan Pembentukan Basis Data Pajak Daerah
10. Perhitungan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah



11. Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Perjanjian Sewa dan SKRD
12. Pengelolaan dan Updating Data Retribusi Daerah

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Pengukuran Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dokumen LKIP ini. Adapun Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 diringkas sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN PENDAPATAN KAB. ROTE NDAO TAHUN 2019**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
<p>Peningkatan kualitas penerimaan daerah</p>	<p>a.Jumlah dan macam pajak daerah  b.Jumlah dan macam retribusi daerah  c.Jumlah penerimaan pajak daerah  d.Jumlah penerimaan retribusi daerah  e.Jumlah penerimaan lain-lain PAD yang sah</p>	<p>8 Jenis Pajak  3 Jenis Retribusi  Rp8.118.669.051  Rp490.146.000  Rp2.022.944</p>
<p>Peningkatan fungsi-fungsi organisasi yang dapat meningkatkan mutu pelayanan</p>	<p>Persentase sosialisasi / penyuluhan pajak dan retribusi yang dilaksanakan oleh aparatur</p>	<p>100 %</p>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas- tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan Renstra . Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dan diperanjkikan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja.

- **AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN ROTE NDAO**  
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao adalah Renstra dan Perjanjian Kinerja 2019, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan metode :

- **PENGUKURAN KINERJA**

1. **Metode Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja Indikator kinerja sasaran dibuat untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kerjanya. Dengan demikian keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dan terukur dengan jelas.

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran sebagai berikut :

$X \geq 85 \%$	Sangat Berhasil
$70 \% \leq X < 85 \%$	Berhasil
$55 \% < X < 70 \%$	Cukup Berhasil
$X \leq 55 \%$	Belum Berhasil

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat jelaskan sebagai berikut :

<b>SASARAN 1</b>	Peningkatan Kualitas Penerimaan Daerah
------------------	--

Sasaran ini diarahkan dalam rangka Mewujudkan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah. Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp.1.679.497.358 (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), terealisasi sebesar Rp.1.637.385.328,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau 97,49%

## Capaian Indikator Kinerja Sasaran

### Peningkatan Kualitas Penerimaan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian
			Target	Realisasi	
<b>Jumlah dan macam pajak daerah</b>	Jumlah	8	8	8	100%
<b>Jumlah dan macam retribusi daerah</b>	Jumlah	3	3	3	100%
<b>Jumlah penerimaan pajak daerah</b>	Rp	8.943.853.351	8.118.669.051	9.424.973.890,95	116,09%
<b>Jumlah penerimaan retribusi daerah</b>	Rp	343.379.000	490.146.000	487.733.000	99,51%
<b>Jumlah penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</b>	Rp	0	0	0	0%
<b>Jumlah penerimaan lain-lain PAD yang sah</b>	Rp	1.731.351	2.022.944	13.676.208	676,05%
<b>Total Rata-Rata</b>					<b>181,94%</b>

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan bahwa:

- a. Jumlah pajak daerah yang ditargetkan sebanyak 8 macam dan realisasinya juga sesuai dengan target yakni 8 macam atau 100%.

Dari hasil realisasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran “*Jumlah dan Macam Pajak Daerah*” adalah sebesar 100% atau dikategorikan *Sangat Berhasil*.

- b. Jumlah dan Macam Retribusi Daerah yang ditargetkan sebanyak 3 macam dan realisasinya juga sesuai dengan target yakni 3 macam atau 100%.

Dari hasil realisasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran “*Jumlah dan Macam Retribusi Daerah*” adalah sebesar 100% atau dikategorikan *Sangat Berhasil*

- c. Target penerimaan pajak daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp.8.118.669.051,- dan realisasi Rp.9.424.973.890,95,- atau 116,09% (mengalami peningkatan).

Dari hasil realisasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran “*Jumlah Penerimaan Pajak Daerah*” adalah sebesar di atas 116,09% atau dikategorikan *Sangat Berhasil*.

Masalah yang dihadapi yaitu : penentuan target pajak yang tidak sesuai dengan potensi yang ada sehingga dalam pelaksanaan terjadi realisasi diatas target penerimaan.

Pemecahan masalah/Solusi yaitu : sebelum menentukan target pajak perlu dilakukan pendataan sehingga dalam penentuan target betul-betul sesuai dengan potensi yang ada.

- d. Target penerimaan retribusi daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp. 490.146.000,- dan realisasi Rp.487.733.000,- atau 99,51 %.

Dari hasil realisasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran “*Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah*” adalah sebesar di atas 99,51% atau dikategorikan *Sangat Berhasil*.

Masalah yang dihadapi yaitu : penentuan target retribusi yang tidak sesuai dengan potensi yang ada sehingga dalam pelaksanaan terjadi realisasi diatas target penerimaan.

Pemecahan masalah/Solusi yaitu : sebelum menentukan target retribusi perlu dilakukan pendataan sehingga dalam penentuan target retribusi betul-betul sesuai dengan potensi yang ada.

- e. Target Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2019 sebesar Rp.2.022.944,- dan realisasi sebesar Rp.13.676.208. Atau sebesar 676,05 %.

Dari hasil realisasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran “*Jumlah Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah*” adalah sebesar di atas 676,05% atau dikategorikan *Sangat Berhasil*.

Masalah yang dihadapi yaitu : penentuan target Jumlah Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah, tidak sesuai dengan potensi yang ada sehingga dalam pelaksanaan terjadi realisasi diatas target penerimaan.

Pemecahan masalah/Solusi yaitu : sebelum menentukan target Jumlah Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah perlu dilakukan pendataan sehingga dalam penentuan target betul-betul sesuai dengan potensi yang ada.

<b>SASARAN 2</b>	Peningkatan Fungsi-Fungsi Organisasi Yang Dapat Meningkatkan Mutu Pelayanan
------------------	---

Sasaran ini diarahkan dalam rangka peningkatan kesadaran para wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp.1.679.497.358 (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), terealisasi sebesar Rp.1.637.385.328,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau 97,49%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya Fungsi-Fungsi Organisasi Yang Dapat Meningkatkan

Mutu Pelayanan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian
			Target	Realisasi	
<b>Persentase Sosialisasi / Penyuluhan Pajak dan Retribusi yang Dilaksanakan Oleh Aparatur</b>	%	-	100%	100%	100%



Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 aparatur yang melaksanakan sosialisasi/ Penyuluhan Pajak dan Retribusi sebanyak 6 orang Narasumber di 6 kecamatan, dalam realisasi pelaksanaannya 100%.

Dari hasil realisasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran "*Peningkatan Fungsi-Fungsi Organisasi Yang Dapat Meningkatkan Mutu Pelayanan*" adalah sebesar 100% atau dikategorikan *Sangat Berhasil*.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 yang bersumber APBD dengan rinciannya dapat digambarkan sebagai berikut :

### Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	
		Rp	%
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>7.092.851.818</b>	<b>6.817.693.994</b>	<b>96,12</b>
Belanja Tidak Langsung	4.105.512.818	3.900.274.667	95,00
Belanja Langsung	2.987.339.000	2.917.419.327	97,66
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	785.076.142	767.099.099	97,71
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	512.765.500	503.036.800	98,10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	9.898.100	98,98
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.679.479.358	1.637.385.328	97,49

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 ini merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao. Media ini sangat penting sebagai umpan balik pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait. Sebagaimana kita maklumi bahwa berbagai pengalaman dan hikmah dari kelemahan-kelemahan sistem pendekatan pembangunan yang telah dilakukan selama ini maka perspektif pembangunan di era Otonomi Daerah yang luas dewasa ini cenderung berkembang kearah yang menuntut efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas, kebijaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu betapapun sederhananya kriteria yang digunakan, identifikasi terhadap kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan harus disikapi secara transparan dan disajikan secara tegas dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kebijakan yang akan diterapkan dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan pembangunan sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pejabat dan Aparatur Pemerintah yang didukung dengan etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban, serta mampu melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan dibarengi oleh suatu perwujudan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian mengingat akuntabilitas kinerja ini perlu dievaluasi secara terus-menerus sebagai kerangka pertanggungjawaban maka perlu disusun dalam suatu bentuk laporan yang dibuat secara periodik.

Akhir kata, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang membantu di lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao serta atas kerjasamanya dalam penyelesaian LKIP Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

Baa, 20 Januari 2020

Kepala Badan Pendapatan

Kabupaten Rote Ndao

**Melkianus Ndun, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630327 198503 1 014

Filename: LKIP BAPENDA\_A8EDDE7  
Directory: C:\Users\Windows\AppData\Local\Temp  
Template: C:\Users\Windows\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot  
m  
Title:  
Subject:  
Author: ismail - [2010]  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 3/30/2020 8:49:00 AM  
Change Number: 5  
Last Saved On: 9/14/2020 10:35:00 AM  
Last Saved By: Windows  
Total Editing Time: 36 Minutes  
Last Printed On: 9/14/2020 10:36:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 26  
Number of Words: 4,636 (approx.)  
Number of Characters: 29,905 (approx.)